



Persiapan Indonesia – Malaysia Hadapi EUDR

Indonesia dan Malaysia sangat kompak dalam hal bergulat menghadapi regulasi Uni Eropa yang merintang produk sawit. Keduanya disatukan dalam Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC) dengan misi bersama memperjuangkan produk sawit di pasar global. Perjuangan Indonesia-Malaysia yang saat ini menggelora adalah upaya untuk mendapatkan “perlakukan adil” Uni Eropa. Kedua negara jiran membentuk gugus tugas bersama yang telah menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang berkaitan dengan masa depan sawit di pasar Eropa.

**Selengkapnya di halaman 2*

Pemerintah Harus Genjot PSR

Produktivitas sawit yang dikelola petani masih jauh dari kata memuaskan. Padahal lahan yang digarap petani ini mencapai 42% atau 6,9 juta hektar dari keseluruhan kebun sawit di Indonesia. Produktivitas yang rendah tersebut turut menyebabkan produksi minyak sawit nasional bergerak stagnan di sekitar 48 juta ton. Sementara kebutuhan terhadap minyak sawit semakin meningkat baik di sektor pangan akibat pertumbuhan penduduk maupun di sektor energi. Dengan berbagai cara dan regulasi, pemerintah terus mengupayakan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) demi meningkatkan produktivitas.

**Selengkapnya di halaman 9*

Sinergi dalam Menanggapi Isu Negatif Sawit

Isu kelapa sawit kerap menghiasi berita-berita nasional maupun internasional. Informasi yang dimuat di berita, sebagian bernada positif dan sebagian lagi negatif. Dengan menggunakan *sentiment analysis*, dapat dipetakan media mana yang aktif menggaungkan isu positif maupun negatif dari sawit.

**Selengkapnya di halaman 7*



dok. PTPN V



Sofyan Djalil

Editorial

Segala puji bagi Tuhan, edisi pertama Buletin IPOSS News ini dapat diterbitkan. IPOSS News diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan para diplomat dalam menghadapi isu-isu sawit yang tengah hangat dibicarakan, dalam kancah nasional, regional dan global. Tentu masih terdapat banyak kekurangan pada edisi pertama ini. Semoga kedepan dapat lebih baik.

Persiapan Indonesia – Malaysia Hadapi EUDR



Menjelang implementasi penuh European Union Deforestation Regulation (EUDR), Indonesia bersama Malaysia yang tergabung dalam Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC) berupaya keras mendapatkan “perlakuan adil” dari Uni Eropa. Sebagai negara pemasok terbesar sawit dunia, keduanya membentuk gugus tugas bersama (*joint task force/ JTF*) yang telah melakukan dua kali pertemuan penting.

Pertemuan JTF pertama yang berlangsung di Jakarta pada akhir Agustus 2023 berfokus mengatasi perbedaan waktu implementasi EUDR antara UMKM Uni Eropa dan pemasok dari luar Uni Eropa. Pasalnya pelaku UMKM di Uni Eropa diberikan tenggang waktu hingga Juni 2025, sementara bagi negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, diberlakukan enam bulan lebih awal.

JTF pertama juga membahas beberapa point utama, antara lain: memastikan petani sawit tetap terlibat dalam rantai pasok minyak sawit ke Uni Eropa, mendorong diakuinya sertifikasi nasional Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) oleh Uni Eropa, membuat sistem ketelusuran (*traceability tools*), menentukan *country benchmarking*, dan memastikan keamanan data sawit yang akan dipublikasi.

Selanjutnya pada pertemuan JTF kedua yang berlangsung di Malaysia pada Februari 2024, pembahasan *traceability tools* menjadi salah satu topik yang mengemuka. Disepakati bahwa selain terkait isu keamanan pangan, *traceability* ini juga memberikan jaminan keaslian produk bukan berasal dari lahan deforestasi.

Dikutip dari situs Ditjenbun Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan,

Kementan, Prayudi Syamsuri, menggarisbawahi pentingnya fungsi National Dashboard for Commodities (NDC) sebagai alat penelusuran komoditas-komoditas yang terkait EUDR.

NDC ini nantinya akan menjadi bangunan sistem utama yang berisi data dan informasi komplit dari hulu hingga hilir. Nantinya data NDC akan terintegrasi dengan data pekebun (E-STDB) dan data perusahaan (Siperibun) yang pada akhirnya akan menghasilkan barcode yang memuat aspek ketelusuran.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO pada 9 Desember 2019. Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE yang menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi (*high risk*) terhadap deforestasi, sehingga secara bertahap akan dihapuskan penggunaannya. Kini semua pihak tengah menunggu putusan WTO. Indonesia sendiri dalam sikap optimis dapat memenangkan gugatan.

IPOSS berpandangan, pembahasan yang lebih detail tentang keamanan data dalam NDC terkait *traceability* yang disyaratkan dalam EUDR perlu dilakukan secara hati-hati. Dalam hal ini sebetulnya tidak ada permasalahan deforestasi lahan sawit Indonesia seperti yang sempat dituduhkan Uni Eropa. Lahan sawit di Indonesia yang berasal dari hutan primer hanya 3% dari total keseluruhan. Sedangkan selebihnya adalah dari lahan hutan yang terdegradasi.

Yang menjadi problem utama saat ini justru adanya klaim terhadap lahan sawit yang dianggap masuk dalam kawasan hutan. Hal ini terjadi karena kawasan hutan yang ada sekarang belum seluruhnya berasal dari hasil penetapan resmi. (Dimas, Mina, Denis)

Bioavtur Sawit Masa Depan Industri Penerbangan?

International Air Transport Association (IATA) menargetkan untuk mencapai *net-zero emission* pada tahun 2050. Pengurangan emisi tersebut salah satunya dicapai dengan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur. Adapun di kawasan Uni Eropa, ReFuelEU Aviation Initiative telah mengusulkan mandatori penggunaan bioavtur sebesar 2% mulai tahun 2025 hingga mencapai 63% pada tahun 2050. Tren penggunaan bioavtur juga berlangsung di Amerika Serikat. Pemerintahan Joe Biden telah mengusulkan penggunaan 3 miliar galon bioavtur pada 2030 dan penggunaan 100% pada tahun 2050.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 dan *net zero emission* pada tahun 2060, termasuk didalamnya kontribusi dari sektor energi dan transportasi. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 Pemerintah telah mengatur kewajiban pencampuran bahan bakar nabati dalam bahan bakar jenis avtur dengan persentase sebesar 5%.

Dalam memantapkan langkah mendukung penurunan emisi karbon dunia tersebut, Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, buah dari proses panjang selama 13 tahun yang dilakukan Pertamina dalam merintis bahan bakar aviasi ramah lingkungan dengan berbagai uji coba. Produksi bioavtur dilakukan dengan melalui pengujian ketat agar dapat diterima standar internasional. Hal ini juga berkaitan dengan faktor keamanan dalam dunia penerbangan yang tidak dapat ditawar.

Indonesia mencatat sejarah baru dengan berhasil melakukan uji coba penerbangan pertama dengan bahan bakar minyak nabati campuran minyak inti

kelapa sawit pada 6 Oktober 2021. Pesawat CN235-220 FTB yang menggunakan campuran bioavtur 2,4% bioavtur berbasis sawit (Bahan Bakar J2,4) terbang mulus melintasi langit Bandung ke Jakarta.

“Keberhasilan ini akan menjadi tahap awal dalam peningkatan kontribusi bioavtur di sektor transportasi udara dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keamanan energi nasional,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Pada tahap berikutnya, Garuda bersama Pertamina

berhasil menerbangkan pesawat komersial berbahan bakar bioavtur sawit dengan rute Jakarta ke Solo PP tanpa mengalami kendala pada 27 Oktober 2023. Uji coba dilakukan dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800NG (PK-GFX).

Dalam pandangan IPOSS, Indonesia tidak perlu khawatir tentang target *net zero emission* yang salah satunya akan diimplementasikan pada industri penerbangan.



Dengan luas lahan sawit Indonesia, lebih dari 16 juta hektar, dan besarnya volume minyak goreng yang dihasilkan, tersedia banyak sekali bahan baku bioavtur baik dari minyak sawit maupun limbah (POME dan minyak jelantah), sehingga maskapai nasional tetap bisa memenuhi kebutuhan bioavtur yang akan diwajibkan dalam beberapa tahun mendatang. Indonesia bukan sekadar optimis bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi seiring dengan permintaan SAF ke depan yang semakin meningkat, Indonesia menjadi salah satu negara yang akan diuntungkan lantaran menjadi produsen terbesar minyak kelapa sawit di kancah global. (Aji, Mina, Denis)

Penyakit Busuk Pangkal Batang Bukan Karena Petir



Pangkal Batang Busuk (dok. pkt-group)

Sebagaimana tanaman lainnya, pohon sawit bisa menghadapi ancaman mematikan akibat pembusukan pada pangkal batangnya. Penyakit ini kalau tidak diwaspadai dapat mengancam masa depan sawit Indonesia.

Awalnya banyak petani berpikir bahwa beberapa pohon sawitnya mati akibat sambaran petir. Pangkal batangnya membusuk dan secara perlahan tapi pasti akan sakit lalu sekarat. Anehnya, banyak pohon di Sumatera mengalami hal yang sama. Setelah dilakukan penelitian secara ilmiah, ternyata pohon-pohon sawit itu terserang penyakit yang dinamakan ganoderma boninense, yang suka memangsa pangkal batang sawit. Bukan karena sambaran petir yang mematikan.

Dr. Darmono Taniwiryono, Co-Founder Roundtable Ganoderma Management, menyampaikan hasil pantauan timnya bahwa dari Medan sampai Rantau Prapat, Sumatera Utara, banyak pohon bertumbangan yang diakibatkan oleh serangan ganoderma. Bahkan dengan infrastruktur perkebunan sawit di Sumatera Utara yang sudah sangat baik sekalipun, tetap saja pelaku usaha kewalahan dalam pengendalian hama sawit ini.

Ganoderma ternyata tidak hanya ditemukan di wilayah Sumatera, tetapi juga ditemukan di Sulawesi dan Kalimantan. Berdasarkan data Sipereda Kementerian Pertanian RI, tren peningkatan intensitas serangan ganoderma di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mengalami peningkatan serangan yang cukup signifikan. Pada Januari 2023 luas serangan ganoderma hanya seluas 2.714 Ha, dan pada akhir tahun (Desember 2023) meningkat hingga 8.794 Ha.

Menurut majalah Sawit Indonesia, selama tahun 2023 yang lalu, penyakit busuk pangkal telah menyerang perkebunan sawit di Indonesia mencapai 170.593 Ha. Banyak pihak menilai, bila ini dibiarkan akan berpotensi pada merosotnya *yield* produksi sawit hingga 90%. Bukan main, di tengah banyaknya isu di industri sawit Indonesia yang mesti dibenahi, muncul pula penyakit sawit.

Kengerian jamur ganoderma ini dianggap sangat mengkhawatirkan karena banyak petani yang masih belum mengetahui gejalanya pada tanaman. Ini sudah barang tentu bisa menyebabkan kerusakan pohon akan lebih cepat.

Beberapa ahli sawit mengatakan bahwa, bila satu tanaman sudah terjangkit, maka tanaman tersebut sudah tidak bisa disembuhkan dan harus segera dimusnahkan hingga ke akar untuk menghindari penularan pada tanaman lainnya.

“Jadi kekhawatiran ini bukan hoax tetapi ini (ganoderma) nyata,” jelas Dr. Darmono.

Pengendalian ganoderma memang tidak mudah. Pasalnya ketahanan kelapa sawit terhadap ganoderma berbeda-beda dan tidak ada kelapa sawit yang resisten dan imun terhadap ganoderma. Penggunaan bahan tanam toleran ganoderma juga tidak dapat menjamin tanaman kelapa sawit bisa aman infeksi ganoderma pada masa awal perkembangan kelapa sawit atau pada fase (Tanaman Belum Menghasilkan) TBM.

Banyak ahli menilai, upaya pencegahan dan pengendalian terbaik adalah dengan mempersiapkan bahan tanaman yang toleran serta didukung oleh pengendalian secara kultur teknis dan hayati.

IPOSS berpandangan, upaya pengendalian serangan ganoderma perlu dilakukan segera dan secara komprehensif, mengingat infeksi penyakit ganoderma sangat cepat menyebar. Jika tidak ditangani secara serius, fenomena ini bukan sekadar tentang menurunnya produktifitas sawit, melainkan beresiko pada eksistensi tanaman sawit yang menopang kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. (Aji, Mina)

Sawit: Esensi Kehidupan yang Tak Tergantikan



Ilustrasi Produk Turunan Sawit

Sangat sulit menyebutkan produk apa di sekitar kita yang tidak mengandung minyak kelapa sawit. Pasalnya sekitar 50% produk kebutuhan sehari-hari yang beredar di seluruh dunia, dipastikan berbahan sawit. Mulai dari peralatan mandi: seperti sampo, sabun, pasta gigi, perlengkapan kosmetik: bedak, lipstik, pelembab, produk makanan: minyak goreng, margarin, krim, hingga produk kesehatan: suplemen dan vitamin.

Bukan hanya itu, hilirisasi sawit telah menghasilkan biodiesel, bahkan bioavtur, sebagai BBM kendaraan yang ramah lingkungan. Maskapai penerbangan Garuda sendiri pernah mencobanya beberapa kali dan bisa dikatakan sukses.

Tingginya kebutuhan manusia akan minyak nabati, terutama sawit, tampaknya akan membuat dilema banyak pihak, tanpa terkecuali Uni Eropa sebagai pihak yang mempermasalahkan sawit. Sikap penolakan terhadap industri sawit nyatanya justru menimbulkan problematika baru yang jauh lebih serius. Mereka harus memikirkan cara bagaimana produk minyak nabati lain bisa menghasilkan kuantitas serta kualitas sebaik sawit.

Total konsumsi minyak nabati dunia pada tahun 2022 mencapai 210,2 Juta ton. Minyak sawit mentah (CPO) menjadi penyumbang terbesar kebutuhan minyak nabati yaitu sebesar 36,6%, disusul minyak kedelai 27%, minyak biji rapa (canola) 14,9%, minyak bunga matahari 9,1% dan minyak inti sawit (CPKO) sebesar 4,1%.

Tingginya ketergantungan dunia terhadap minyak sawit dibuktikan dengan tingkat konsumsinya yang tidak dapat tergantikan oleh minyak nabati lain. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan sawit yang

dapat memproduksi secara kontinu sepanjang tahun. Sebagai tanaman siklus tahunan, kelapa sawit dapat mencapai usia 25 tahun atau bisa lebih lama, sehingga kemampuan produksi minyak sawit memiliki durasi yang lebih panjang dan berkelanjutan. Lain hal dengan siklus tanaman yang harus rutin dilakukan hingga beberapa kali dalam setahun pada minyak nabati lain seperti kedelai, bunga matahari dan *canola*.

Ketersediaan minyak sawit di pasar dunia tidak terlepas dari produktivitas minyak sawit yang mampu menghasilkan 3.36 ton minyak per hektar, 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan minyak kedelai dan 4 kali lipat dibandingkan minyak *canola* serta bunga matahari. Dapat dikatakan secara proporsi penggunaan lahan, kelapa sawit hanya menggunakan sekitar 10% dari total lahan tanaman minyak nabati dunia, padahal produksinya menguasai 36,6% pasar minyak nabati.

Dalam hal efisiensi lahan, sawit jelas tak terkalahkan. Perlu berapa ratus hektar lahan baru untuk bisa menggantikan kuantitas yang mampu dihasilkan kelapa sawit? Dalam hal kualitas, minyak sawit yang memiliki titik didih tinggi dan lemak jenuh tinggi, ideal untuk menciptakan berbagai macam krim dan panganan dengan tekstur lembut. Sementara minyak nabati lainnya harus melewati proses dihidrogenasi atau penambahan atom hidrogen secara kimia ke dalam molekul lemak untuk meraih bentuk yang sama. Namun, proses ini juga akan menghasilkan produk dengan lemak tak jenuh yang tidak sehat dikonsumsi.

Dalam pandangan IPOSS, perkebunan sawit yang ada saat ini perlu dipertahankan dengan tetap menjunjung konsep sawit yang berkesinambungan dan bersahabat dengan alam. Berbagai upaya peremajaan kebun sawit harus dilaksanakan sehingga lahan yang ada termanfaatkan secara optimal. (Mina, Denis)

Sisi Baik Sawit yang Kadang Dilupakan



Sebagian pihak terlalu terpaku pada sisi negatif industri kelapa sawit. Industri ini dianggap penyebab deforestasi, degradasi habitat satwa, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pihak-pihak tersebut yang antara lain adalah Uni Eropa yang melakukan ragam cara penolakan melalui berbagai regulasi demi menghambat pertumbuhan pasar sawit di wilayahnya.

Industri sawit adalah penopang hajat hidup jutaan manusia. Sawit juga industri padat karya yang mampu berkembang dan menyerap tenaga kerja di mana saja. Masyarakat sekitar bisa terlibat secara langsung dengan menjadi karyawan perkebunan, bahkan menjadi petani sawit plasma atau swadaya. Tenaga kerja pedesaan juga terserap pada sektor ekonomi lain yang memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan perkebunan kelapa sawit seperti sektor perdagangan, transportasi dan pengangkutan, sektor makanan minuman, dan sektor lainnya.

Tidak hanya pekerja langsung, ada lagi tenaga kerja tidak langsung yang mendapat manfaat dari industri ini, yakni mereka yang bergerak pada kegiatan pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), pembibitan, *supplier* pupuk dan alat-alat perkebunan, *supplier* alat-alat kantor, *supplier* beras untuk catu pekerja, maupun kegiatan lainnya yang terkait dengan pekerjaan teknis di kebun, kegiatan *community development* dan CSR yang juga melibatkan tenaga kerja di luar perusahaan perkebunan.

Berdasarkan hasil perhitungan efek pengganda (*multiplier effect*) industri sawit yang dianalisis dari Tabel *Input-Output*, diperoleh nilai indeks *multiplier*

tenaga kerja perkebunan sawit sebesar 2,64 (PASPI, 2023). Ini artinya perkebunan kelapa sawit mampu menciptakan kesempatan kerja dalam perekonomian nasional sebesar 2,64 kali dari tenaga kerja yang terserap dalam industri sawit. Oleh karena itu, diperkirakan total tenaga kerja yang terlibat di industri kelapa sawit adalah sebesar 19,2 juta pekerja, di mana di dalamnya terdapat pekerja tidak langsung sebesar 11,94 juta pekerja.

Industri sawit terbukti secara empiris memiliki kontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di negara produsen seperti Indonesia. World Growth (2011) mengemukakan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi bagian penting dalam mengurangi kemiskinan. Peneliti Edwards (2019) juga memperkirakan, berkat adanya industri sawit, sekitar 2.6 juta masyarakat Indonesia terangkat dari kemiskinan. Sementara data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2019) mengungkapkan sejak tahun 2000, sekitar 1.3 juta penduduk pedesaan dan sekitar 10 juta penduduk Indonesia berhasil keluar dari kemiskinan melalui pertumbuhan industri sawit.

Dalam pandangan IPOSS, meskipun bukan tanaman asli Indonesia, namun sawit telah menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Untuk itulah, keberadaan sawit harus tetap dipertahankan menjadi komoditi unggulan bersama. Pemerintah, pelaku industri sawit, dan pihak terkait lainnya perlu meningkatkan sinergitas untuk dapat menjamin masa depan produk kelapa sawit di pasar global. Hal-hal yang merintang seperti regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa juga perlu ditangani bersama dan melalui berbagai perspektif, sehingga strategi-strategi untuk penguatan pasar sawit dapat dilakukan secara tepat dan optimal. (Aji, Mina, Denis)

Sinergi dalam Menanggapi Isu Negatif Sawit



Ilustrasi Sinergi

Isu-isu seputar kelapa sawit seringkali menjadi berita yang tersebar luas di media, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan menggunakan sentiment analysis, dapat dipetakan media yang aktif menggaungkan isu positif maupun negatif dari industri sawit.

Sentiment analysis merupakan metode yang digunakan pada bidang linguistik dan ilmu komputer untuk menentukan sentimen yang terkandung dalam teks secara otomatis (Taboada, 2016). Sentimen dapat dicirikan sebagai evaluasi positif atau negatif yang diungkapkan melalui bahasa.

Para peneliti muda IPOSS mengaplikasikan analisis tersebut dengan tujuan memetakan penggaung isu seputar industri sawit. Analisis menggunakan webscraping dari Google News menggunakan Natural Language Toolkit (NLTK) pada Python dengan tingkat akurasi sebesar 79% terhadap data berita berbahasa Inggris tahun 2019-2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Media yang paling vokal dalam menyuarakan isu positif sawit adalah The Edge Malaysia, Business Day, dan NST. The Edge Malaysia berfokus pada aspek ekonomi seperti bagaimana sawit menopang perekonomian. Business Day dari Nigeria berfokus pada aspek sosial dan ekonomi tentang bagaimana sawit menopang perekonomian negara. Serta NST dari Malaysia yang berfokus pada profitability, sustainability, dan food security dari industri sawit.
- Terdapat beberapa media yang seringkali vokal dalam menyuarakan isu negatif sawit. Ada yang berfokus pada aspek lingkungan dan sosial sawit seperti deforestasi, konflik lahan, dan kesetaraan gender. Ada juga berfokus pada aspek sosial dan

nilai ekonomi sawit. Ada pula yang merupakan media bisnis lintas sustainability ecosystem yang berfokus pada aspek sosial seperti kesetaraan gender dan kesejahteraan petani.

Dalam menanggapi berbagai isu seputar sawit tersebut, Indonesia selaku produsen sawit terbesar dunia perlu memperkuat hubungan ekonomi politik berbentuk mutual dependence dengan negara-negara produsen sawit untuk melindungi produk minyak kelapa sawit dan produk turunannya di tingkat global. Sebagai contoh, Indonesia dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) bekerjasama dengan Malaysia dan negara produsen sawit lainnya, mengintensifkan upaya untuk melakukan kampanye positif terhadap kelapa sawit secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Kampanye negatif ini perlu dilawan melalui kampanye positif yang masif dan terstruktur dengan menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. Melalui program Countering Anti Palm Oil Campaign yang dilakukan oleh CPOPC, dilakukan kampanye positif terkait industri sawit yang memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs).

Kampanye tersebut meliputi kampanye advokasi di Uni Eropa, kampanye media sosial di negara-negara anggota, serta strategi komunikasi dan promosi di negara-negara konsumen minyak sawit.

Upaya ini harus dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat termasuk para guru dan dosen. Dalam pelaksanaannya, kampanye positif juga harus didukung dengan bukti konkrit pada perkembangan industri sawit menuju arah yang lebih baik.

(Dwivayani, Oktadiani, Denis)

Tantangan Implementasi *Sustainable Aviation Fuel*



Dok. Garuda Indonesia

Sustainable aviation fuel (SAF) merupakan bahan bakar aviasi berkelanjutan yang dapat menggantikan peran avtur sebagai bahan bakar konvensional. Bahan bakar ini diproduksi dari berbagai bahan baku seperti limbah, minyak dari tanaman, dan biomassa lainnya. Penggunaan SAF secara global diyakini dapat mengurangi emisi CO₂ sektor penerbangan hingga 80%.

Tren penggunaan SAF meningkat sejalan dengan target International Air Transport Association (IATA) untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2050. Negara-negara seperti Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat telah menerapkan dan mempertimbangkan mandat penggunaan SAF. Singapura juga telah merencanakan mandat SAF pada tahun 2026 sebesar 1%.

Di Indonesia, uji coba produksi SAF berbahan baku minyak inti kelapa sawit atau RBDPKO telah dilakukan sepanjang 2012 hingga 2021. Pada bulan Oktober 2023, Pertamina dan Garuda Indonesia berhasil menggunakan SAF bauran J2.4 pada penerbangan komersial rute Jakarta-Solo. Rencananya, Pertamina akan mengembangkan kilang SAF berbahan baku multifeedstock seperti minyak jelantah dan palm oil mill effluent (POME) untuk dapat mencapai produksi sebesar 5 juta kL di tahun 2026.

Pengembangan SAF secara komersial menghadapi tantangan ketersediaan dan harga. Menurut World Economic Forum, biaya produksi SAF metode Hydrotreated Esters and Fatty Acids (HEFA) mencapai 2-3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan avtur konvensional. Namun, harga ini diperkirakan akan turun seiring perkembangan teknologi dan skala produksi SAF yang lebih besar. Meskipun demikian,

penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan ini tentu berpotensi meningkatkan harga tiket pesawat.

Penelitian yang dilakukan para Peneliti Muda IPOSS berupaya untuk melihat dampak adanya beban biaya tambahan (surcharge) apabila SAF diimplementasikan secara komersial di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengukur keterjangkauan surcharge pada tiket pesawat yang muncul agar dapat diterima oleh seluruh stakeholder industri penerbangan.

Berdasarkan hasil penghitungan, penetapan surcharge SAF hingga bauran SAF 10% (J10) relatif dapat diimplementasikan karena hanya menambah harga tiket pesawat sebesar 1-5% tergantung jarak tempuh masing-masing rute penerbangan. Dalam kondisi ini, pembiayaan surcharge dapat dibebankan kepada penumpang.

Meskipun demikian keterjangkauan harga masih dapat dicapai karena tingkat bauran SAF yang direkomendasikan aviasi global masih rendah. Oleh sebab itu, apabila nantinya SAF diimplementasikan di Indonesia, perlu adanya rekomendasi perubahan pada Kepmenhub No. 7/2023 tentang Biaya Tambahan (surcharge) yang Disebabkan oleh Fluktuasi Bahan Bakar, agar dapat menyertakan komponen SAF dalam biaya yang bisa dikenakan surcharge.

Perkembangan SAF di Indonesia membutuhkan dukungan penuh dalam bentuk komitmen serta intervensi kebijakan yang efektif. Hal ini mencakup penerapan mandat dan skema insentif yang tepat, serta penyelarasan kebijakan dengan standar internasional. Tujuannya adalah agar implementasi SAF di Indonesia dapat berjalan lancar sesuai dengan visi global dalam industri aviasi untuk mengurangi emisi di sektor penerbangan. (Oktadiani, Dwivayani)

Pemerintah Harus Genjot PSR



Dok. Biro KLIP Kemenko Perekonomian

Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tampaknya menjadi satu-satunya jalan untuk meningkatkan produktivitas sawit Indonesia. Pasalnya sudah tidak terdapat ruang ekspansi pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sementara kebutuhan terhadap CPO semakin meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk. Belum lagi diversifikasi produk turunan sawit yang juga semakin meluas.

Dari total lahan sawit di Indonesia yang mencapai luas 16,4 juta hektar, sekitar 40% atau sekitar 6,04 juta hektar merupakan perkebunan sawit milik rakyat. Probleminya ada pada produktivitas sawit rakyat yang masih belum sebaik Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN). Perkebunan Rakyat rata-rata hanya mampu menghasilkan 3,34 ton per hektar. Berada di bawah perkebunan negara dan swasta yang mampu menghasilkan 4,6 ton per hektar.

Realitanya capaian dari program PSR yang telah berjalan terbilang masih jauh panggang dari api. Target realisasi PSR sepanjang tahun 2017-2023 mencapai 540 ribu hektar atau 180 ribu hektar per tahun. Namun hingga akhir 2022, realisasi PSR baru mencapai 275 ribu hektar. Realisasi PSR per tahun masih sangat rendah yaitu hanya pada angka 50 ribu hektar, atau 29% saja dari yang ditargetkan.

Demi menggenjot percepatan PSR, Pemerintah memangkas tahap pengajuan PSR dari yang semula enam tahap menjadi hanya tiga tahap dengan proses verifikasi yang dipercepat menjadi 15 hari. Pemerintah hendak menaikkan dana PSR yang awalnya hanya Rp.

30 juta menjadi Rp. 60 juta per hektar. Dengan alur regulasi yang dianggap lebih simpel dan dana yang lebih besar, diharapkan PSR bisa berprogress dengan lebih cepat.

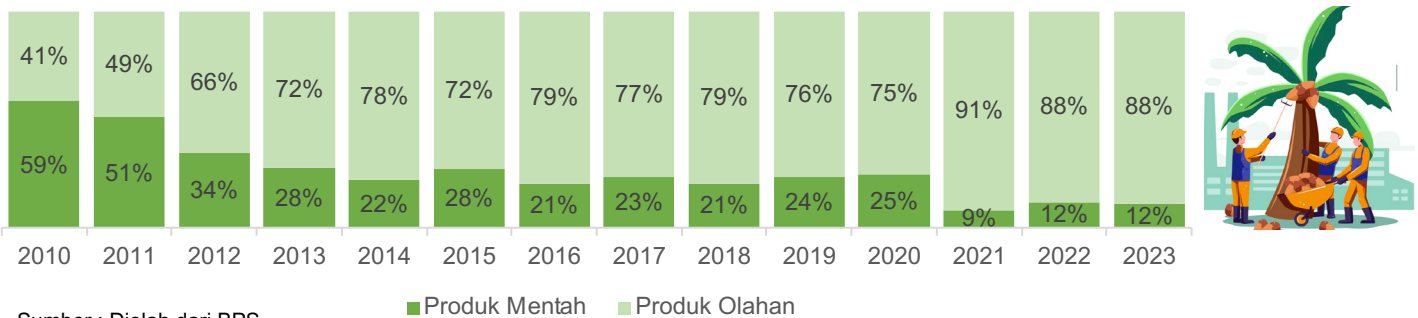
Penambahan dana PSR juga telah diperhitungkan akan mampu mencukupi biaya peremajaan mulai dari proses pembenihan tanaman hingga tanaman sawit produktif yang menghasilkan sehingga meringankan beban petani. Dalam catatan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dari 2017-2024 pemerintah telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp. 9,25 triliun yang digunakan untuk meremajakan sawit di lahan seluas sekitar 331 ribu hektar.

IPOSS berpendapat, upaya peremajaan perkebunan sawit rakyat tidak dapat berjalan dengan maksimal tanpa dukungan dan pendampingan dari pemerintah. Terdapat banyak petani yang masih awam dari mulai hal pemenuhan persyaratan pengajuan PSR hingga pelaksanaannya. Sebagian besar dari mereka juga hidupnya hanya bergantung dengan hasil sawit, sehingga dengan terpaksa lebih memilih untuk tidak mengikuti program PSR yang perlu waktu cukup lama sampai sawit kembali menghasilkan.

Selain dukungan riil untuk para petani, diperlukan juga upaya diseminasi informasi yang lebih gencar dan tepat sasaran untuk memberikan pemahaman yang benar tentang PSR. Jika upaya-upaya tersebut berjalan dengan baik, diharapkan dalam siklus setiap 25 tahun tanaman menghasilkan, perkebunan sawit rakyat selalu dapat diremajakan sehingga produktivitasnya maksimal. (Aji, Dimas)

Hilirisasi Sawit Jadi PR Besar RI

Komposisi Ekspor Industri Kelapa sawit antara Produk Mentah : Olahan



Banyak isu terkait dengan kepala sawit, namun tantangan terbesarnya bisa jadi berupa percepatan hilirisasi. Tidak boleh ada kata puas meskipun produk sawit dalam beberapa tahun belakangan telah menjadi salah satu soko guru ekonomi nasional.

Benar, kelapa sawit telah menjadi komoditas super penting dalam ekonomi Indonesia. Dengan penguasaan perkebunan sawit terbesar di dunia, Indonesia mampu memproduksi lebih dari 50 juta ton minyak sawit sejak 2019 dengan ekspor lebih dari 30 juta ton dalam setahun. Tahun lalu misalnya, ekspor kelapa sawit dan turunannya mencapai USD 27 miliar atau 10.4 persen dari total nilai ekspor dengan jangkauan lebih dari 140 negara.

Pemerintah tidak ada henti-hentinya mendorong terciptanya hilirisasi di Indonesia termasuk hilirisasi industri perkelapasawitan. Hasilnya produk ekspor juga sudah mengalami perubahan dari yang semula didominasi produk mentah (59%) pada akhirnya digantikan produk olahan (88%) yang juga memiliki pangsa pasar yang luas.

Tingginya ekspor minyak sawit tidak terlepas dari sifatnya yang tahan oksidasi dengan tekanan tinggi dan kemampuannya melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, serta daya melapis yang tinggi membuat minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk beragam peruntukan.

Tidak heran kalau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berkomitmen untuk terus mendorong hilirisasi. Pemerintah tidak ingin hanya terkonsentrasi pada bahan baku semata, namun juga harus mampu menghasilkan produk akhir. Dicontohkan, Pemerintah mendorong mandatori biodiesel yang sudah mencapai B-35 dan kini diujicobakan untuk B-40.

Menurut Guru Besar IPB, Prof. Bungaran Saragih, hilirisasi menjadi kunci untuk memajukan sektor kelapa sawit nasional di masa akan datang. Dikatakan, industri kelapa sawit diyakini tetap cerah namun pelaku industri harus terus mendorong penelitian dan pengembangan untuk menekuni hilirisasi produk turunan minyak kelapa sawit.

Dalam rangka hilirisasi ini, beberapa kalangan menilai Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar, antara lain adanya anggapan bahwa *return of investment* pada industri hilir lebih kecil dibandingkan industri hulu, kualitas teknologi dan sumber daya manusia masih terbatas, adanya beberapa isu negatif atas sawit khususnya terkait dengan lingkungan, serta belum adanya cetak biru hilirisasi kelapa sawit Indonesia.

Menyadari berbagai tantangan di atas, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan dukungannya atas pengembangan produk hilir sawit dengan cara melakukan penelitian dan pengembangan dengan menggandeng lembaga penelitian dan universitas.

Dalam catatan IPOSS, hilirisasi industri sawit Indonesia telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tidak hanya dari komposisi ekspor yang sudah semakin didominasi produk olahan tetapi juga pemanfaatan produk hilir di dalam negeri yang semakin besar capaiannya khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Biodiesel contohnya, telah mampu menyerap CPO sebanyak 10,6 juta ton atau 21% dari total produksi CPO nasional, di sisi lain konsumsi CPO untuk pangan (minyak goreng, margarin, dll) mencapai 10,3 juta ton, sedikit di bawah konsumsi biodiesel. Ke depan kebutuhan biodiesel dapat terus meningkat seiring dengan kebijakan energi pemerintah untuk menaikkan bauran biodiesel. (Aji, Dimas)

Mencari Solusi 100% Realisasi ISPO

Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada seluruh pekebun sawit dalam rangka tata kelola kelapa sawit berkelanjutan. Dengan sertifikat ISPO, industri kelapa sawit Indonesia sebagai menjadi pemain utama di pasar global akan lebih terjamin.

Aturan tentang sertifikasi sawit berkelanjutan ini telah ditetapkan sejak 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Kemudian diubah menjadi Permentan nomor 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Dan tahun 2020 diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang ISPO, serta Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ISPO.

Realisasi ISPO diharapkan dapat mendorong akseptabilitas dan daya saing produk serta turunan minyak sawit Indonesia pasar internasional. ISPO menjadi bukti bahwa pengelolaan sawit Indonesia telah sesuai standar yang memperhatikan serta mematuhi aspek-aspek lingkungan. Namun sayangnya, capaian sertifikasi ISPO masih sangat rendah, yaitu baru 37,1% dari yang ditargetkan oleh Pemerintah, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur PPHBun Kementan, Prayudi Syamsuri, yang dikutip dari antaranews.com saat ini dari 16,38 juta hektar tutupan lahan sawit, yang telah mendapat sertifikat ISPO baru mencapai 5,6 juta hektar. Capaian yang masih sedikit ini, membuat industri sawit di Indonesia belum bisa sepenuhnya dianggap memenuhi standar pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Lebih lanjut, sawit Indonesia masih sulit keluar dari stigma perusak lingkungan.

Para pihak yang mengusahakan kebun sawit sudah seharusnya memahami betapa pentingnya menjunjung tinggi aspek keberlanjutan, sebab kelapa sawit bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan yang dapat diwariskan generasi demi generasi. Apabila pengelolaan kelapa sawit tidak distandarkan pada prinsip keberlanjutan maka dikhawatirkan sawit hanya mampu bertahan dalam 1 periode ini, yakni maksimal hingga tahun 2050, setelah itu akan punah.

Dalam mendorong tercapainya realisasi 100% ISPO menjelang tahun 2025, dimana ISPO statusnya menjadi mandatory bagi setiap pekebun sawit, Pemerintah melalui Kementan berkomitmen memperkuat kelembagaan untuk menghadapi tantangan dalam mencapai target ISPO. Terkait persoalan dana untuk proses sertifikasi, pemerintah dapat membantu melalui kebijakan yang sesuai agar memancing minat petani untuk menjalankan prosedur ISPO tersebut, khususnya kebijakan terkait pendanaan ISPO atau pemberian insentif pada harga TBS jika sudah bersertifikat atau kebijakan lainnya yang relevan.

IPOSS berpandangan ISPO adalah sebuah sistem yang sangat baik diterapkan untuk pekebun sawit Indonesia, baik di tingkat perusahaan maupun petani. Penerapan ISPO sama artinya dengan menerapkan Best Management Practices (BMP) kelapa sawit yang memperhatikan keberlanjutan pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam menerapkan ISPO sama artinya dengan melakukan pendataan kebun sawit secara baik, sehingga pemerintah akan memiliki database kebun kelapa sawit dengan informasi yang lengkap, selanjutnya data ini dapat digunakan untuk program pemerintah di masa yang akan datang terkait dengan pendampingan, dan pembinaan. Dengan demikian berbagai upaya pembenahan industri sawit berkelanjutan dapat berjalan optimal serta tepat sasaran. (Dimas, Mina, Denis)



Sistem Pertahanan Sawit Indonesia



Indonesia punya banyak pekerjaan rumah terkait keberlangsungan industri sawit, terutama menjelang implementasi penuh Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) awal tahun depan. Regulasi ini mewajibkan sejumlah komoditas, termasuk sawit, bersertifikat verifikasi atau uji tuntas (due diligence).

Verifikasi dilakukan melalui sistem berbasis geolokasi yaitu data citra satelit dan titik koordinat yang dapat membuktikan komoditas tertentu tidak berasal dari lahan deforestasi.

Untuk itu, Pemerintah RI terus mengupayakan serangkaian program yang mendukung kesiapan sistem pertahanan sawit agar tahan goncangan EUDR yang mencakup legalisasi lahan sawit, sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan penelusuran lokasi tanaman sawit.

Selain itu, pada setiap kesempatan rapat koordinasi, Pemerintah gencar membahas program percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) dan upaya membuka pasar ekspor alternatif.

Komitmen Pemerintah mendukung PSR atau replanting merupakan wujud dari upaya intensifikasi produksi sawit pada lahan yang sudah tersedia. Percepatan PSR inilah sebetulnya yang merupakan langkah riil dalam penguatan ketahanan produk sawit Indonesia.

Dengan suksesnya PSR, produktivitas sawit meningkat dan pembukaan lahan baru menjadi tidak diperlukan. Sebagaimana diketahui bersama, lahan sawit di Indonesia juga berasal dari lahan-lahan yang terdegradasi. Bukan dari hutan primer yang dialihfungsikan menjadi perkebunan.

IPOSS memandang, implementasi penuh EUDR per tahun 2024 akan berdampak pada ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa yang beberapa tahun belakangan mengalami penurunan. Ekspor Indonesia untuk minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit mentah (CPKO) serta produk-produk turunannya ke 28 negara Uni Eropa, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 13% dari 3,7 juta ton di tahun 2022 menjadi 3.2 juta ton. Nilai ekspor juga mengalami penurunan yang lebih besar lagi, yakni sebesar 34% dari 4,9 Miliar USD menjadi 3,2 Miliar USD, karena adanya faktor harga CPO yang turun sebanyak 24% dari tahun lalu.

Meskipun penurunan volume ekspor ke Uni Eropa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi ekonomi negara pengimpor, tetapi faktor regulasi negara tujuan ekspor serta kesiapan Indonesia mengimbangi regulasi tersebut dampaknya juga akan jauh lebih besar. Petani sawit bisa saja tersingkir dari pasar ekspor Uni Eropa. Oleh karenanya, disamping Pemerintah perlu secara serius memperkuat sistem pertahanan sawit, upaya membuka pasar alternatif menjadi sangat perlu dilakukan. (Aji, Dimas)



Pembina: **Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**,
Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP, Ahmad Mina**,
Staf Redaksi: **Dwivayani, Oktadianti**, Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id